

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB HUKUM PEMILIK PANTI ASUHAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

Oleh : RA. Djuhariyah

Dosen Pembimbing Utama : Yayuk Sugiarti., S.H., M.H

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Kesejahteraan anak merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus menjadi prioritas bagi masyarakat dan pemerintah. Kesejahteraan anak mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan fisik, dan mental, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal yang layak. Namun pada faktanya banyak sekali anak yang terlantar di luar sana. Fakta, bahwa tingginya penelantaran anak yang terjadi di masyarakat. Anak yang terlantar tersebut yang telah ditemukan oleh dinsos, puskesmas, maupun masyarakat pada akhirnya dialihkan untuk tinggal di panti asuhan. Disana, mereka mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan mental untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang menjadi individu yang mandiri dan sukses.

Dalam penulisan skripsi ini ditentukan beberapa rumusan masalah, antara lain Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pemilik panti asuhan, Bagaimana tanggungjawab pemilik panti asuhan yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah yuridis normatif, dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip-prinsip hukum. Jenis penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk mengkaji suatu norma atau ketentuan yang berlaku dimana pada penelitian ini lebih menekankan pada analisis materi pedoman dan undang-undang.

Perlunya bentuk perlindungan yang umumnya diberikan oleh panti asuhan perlindungan fisik, perlindungan emosional, perlindungan sosial, perlindungan Pendidikan, dan perlindungan spiritual. Tanggungjawab pemilik panti asuhan dalam tindak pidana kekerasan pada anak asuh dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak dan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bentuk perlindungan yang umumnya diberikan oleh panti asuhan perlindungan fisik, emosional, sosial, Pendidikan, dan spiritual. Tindak pidana kekerasan pada anak asuh dapat dikenakan sanksi pidana seperti pidana penjara atau denda sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak dan kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian dapat melakukan Restitusi atau pemberian kompensasi

Kata Kunci : Tanggungjawab, Kekerasan anak, Panti Asuhan

ABSTRACT

**LEGAL RESPONSIBILITY OF ORPHANAGE OWNERS WHO COMMIT
CRIMES OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN**

By : RA. Djuhariyah

Main Supervisor : Yayuk Sugiarti., S.H., M.H

Accompanying Supervisor : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H.

Child welfare is a very important thing and must be a priority for the community and the government. Child welfare covers various aspects, including physical and mental health, education, protection from violence and exploitation, as well as access to basic needs such as food, clean water, and proper residences. But in fact a lot of children are displaced out there. The fact, that the high neglect of children that occur in the community. The abandoned children who have been discovered by the Social Affairs, Puskesmas, and the community are finally diverted to live in orphanages. Disana, they get education, health, and mental development to help them grow and develop into independent and successful individuals.

In writing this thesis, several formulation of the problem is determined, including how the legal protection of children who receive criminal acts of violence committed by the orphanage owner; how the responsibility of the orphanage owner who committed criminal acts of violence against children.

The type of research used in this thesis is normative juridical, where researchers conduct research by examining library materials or secondary data based on the theory, concepts, and legal principles. Types of normative research are understood as research to study a norm or provision that applies in which this study is more on the analysis of guidelines and law materials.

The need for forms of protection that is generally given by the orphanage of physical protection, emotional protection, social protection, educational protection, and spiritual protection. The responsibility of the orphanage owner in the criminal offense of violence against foster children can be subject to criminal sanctions in accordance with the Child Protection Act and the Criminal Code (KUHP).

The form of protection that is generally provided by orphanages is physical, emotional, social, educational, and spiritual protection. Criminal acts of violence against foster children can be subject to criminal sanctions such as imprisonment or fines in accordance with the Child Protection Law and the Criminal Code (KUHP). Then they can do restitution or compensation

Keywords: responsibility, child violence, orphanage